

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara kepulauan, tarif pengiriman dan penerimaan kargo di Indonesia relatif tinggi dan rantai penerimaan dan pengambilan barang panjang. Diperlukan Bandar Udara sebagai tempat penyediaan pelayanan pengiriman dan penerimaan kargo dengan pelayanan maksimal, tarif yang terjangkau dan kehadirannya dapat membantu pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak melarang adanya monopoli, menjadi terlarang manakala pelaku usaha dalam kegiatan usahanya melakukan praktek monopoli. Praktek monopoli dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal tersebut dapat terlihat pada kasus putusan KPPU No. 03/KPPU-I/2017 atas perkara PT Angkasa Pura II (persero) di Bandar Udara Kualanamu terhadap pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Th. 1999. Guna kepastian hukum bagi pelaku usaha, dalam putusan tersebut telah diuraikan dan dianalisis semua unsur-unsur dalam pemenuhan Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Th. 1999. Dalam putusan tersebut KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* dengan menggunakan alat bukti langsung.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Praktek Monopoli, Monopoli.

ABSTRACT

Indonesia is an archipelago country, outgoing and incoming cargo rates in Indonesia is relatively high and the chain of outgoing and incoming of cargo is very long. Airport was needed as a place of provision of the service to outgoing and incoming cargo with maximum service, affordable rates, and its presence can help economic growth in the surrounding area. Act No. 5 of year 1999 on the prohibition of monopolies and competition practices are unhealthy businesses does not prohibit the existence of monopoly, be forbidden while businessmen in its efforts to engage in the practice of activities monopoly. Monopoly practices prohibited because it can result in unhealthy business competition and can be detrimental to the public interest. It can be seen in the case of KPPU judgement No. 03/KPPU-I/2017 in the case of PT Angkasa Pura II (persero) at Kualanamu Airport against violations of article 17 paragraph (1) and (2) of law No. 5 year 1999. To legal certainty for the businessmen, in the KPPU judgement has been described and analyzed all of the elements in the fulfillment of article 17 paragraph (1) and (2) of law No. 5 year 1999, in the KPPU judgement using rule of reason approach and using direct evidence.

Keywords : ***Business Competition, Monopoly Practices, Monopoly.***